

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Arief Nour Rachman dan Sri Mangesti Rahayu (2015)

Penelitian ini mengambil topik pengaruh *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI tahun 2011-2012. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Persamaan :

1. Beberapa variabel independen yang diteliti yaitu kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komite audit, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan.
2. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

3. Teknik pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan komite audit, sedangkan yang sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit.
2. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 13 perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI tahun 2006-2011, sedangkan yang sekarang menggunakan sampel perusahaan jasa konstruksi.

2. Wuryaningsih Dwi Lestari dan Ika Yulianawati (2015)

Penelitian ini mengambil topik tentang *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 134 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2012. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Persamaan :

1. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi.
2. Beberapa variabel independen yang diteliti yaitu kepemilikan institusional dan komite audit, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan.
3. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.
4. Teknik pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit, sedangkan yang sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit.
2. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2012, sedangkan penelitian yang sekarang mengambil sampel perusahaan jasa konstruksi.

3. Penelitian Rizky Arifani (2013)

Penelitian ini mengambil topik pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE). Sampel dalam penelitian ini adalah 186 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2010-2011, dengan total observasi selama 2 tahun yaitu 372 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling method* dengan *stratified random sampling* menggunakan rumus *Slovin*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh.

Persamaan :

1. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi.
2. Beberapa variabel independen yang diteliti yaitu komite audit dan kepemilikan institusional, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan.
3. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Perbedaan :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen, sedangkan yang sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit.
2. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2011, sedangkan penelitian yang sekarang mengambil sampel perusahaan jasa konstruksi.

4. Penelitian Purweni dan Nik Amah (2012)

Penelitian ini mengambil topik mengenai mekanisme *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *good corporate governance* mempengaruhi

kinerja keuangan selama krisis keuangan tahun 2007-2009. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan model regresi. Sampel dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan perbankan yang terdaftar pada bursa efek Jakarta tahun 2007-2009. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel komisaris independen berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa proporsi komisaris independen perusahaan hanyalah suatu formalitas yang digunakan untuk memenuhi aturan. Sehingga fungsi kontrol yang seharusnya menjadi tanggung jawab komisaris menjadi tidak efektif. Hal ini akan mengakibatkan kinerja perusahaan menurun.

Persamaan :

1. Alat analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan model regresi.
2. Variabel independen yang diteliti yaitu kepemilikan institusional, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan.
3. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.
4. Teknik pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit,

sedangkan yang sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit.

2. Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan sampel perusahaan jasa konstruksi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1.	Arief Nour Rachman, Sri Mangesti dan Rahayu (2015) "Pengaruh Good Corporate Governance dan Financial Leverage Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan"	Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit.	Semua variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.	Wuryaningsih Dwi Lestari dan Ika Yulianawati (2015) "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan"	Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, dan Komite Audit.	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3.	Rizky Arifani (2013) "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan"	Kinerja Keuangan	Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris.	Komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh.
4.	Purweni dan Nik Amah (2012) "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009"	Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen perusahaan hanyalah suatu formalitas yang digunakan untuk memenuhi aturan.

Sumber : Dirangkum oleh Peneliti

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Agent* merupakan pihak yang dipilih oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Teori agensi membantu pengelola dan investor untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi selama investasi berlangsung. Dampak buruk yang terjadi misalnya perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan bagi investor. Atau sebaliknya, investor tidak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Asimetri antara *agent* dengan *principal* dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba menegenai kinerja ekonomi perusahaan. Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu (Rahmawati, 2012:3-4):

1. *Adverse selection* yaitu asimetri informasi yang terdapat satu atau lebih pihak yang melakukan suatu transaksi usaha memiliki informasi lebih atas investor. Hal ini terjadi apabila manajemen dan perusahaan lebih mengetahui kondisi perusahaan pada saat ini dan ke depannya.
2. *Moral hazard* yaitu asimetri informasi yang terdapat satu atau lebih pihak yang melakukan suatu transaksi usaha, pihak-pihak tersebut mengamati apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi mereka, sedangkan investor tidak dapat mengetahuinya. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian.

Tingginya tingkat asimetri informasi antara *agent* dan *principal* merupakan bukti bahwa *principal* kehilangan sumber daya, akses yang cukup terhadap informasi yang relevan guna memonitor tindakan manajer (Schipper, 1989 dalam Rahmawati, 2012:5). Saat asimetri informasi perusahaan tinggi, maka perusahaan dapat memanipulasi laba sebelum laporan keuangan di audit. Semakin tinggi asimetri informasi perusahaan yang terjadi, maka semakin besar kecenderungan perusahaan tidak terdeteksi adanya manipulasi laba.

2.2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja adalah pencapaian suatu hasil perusahaan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan, visi, dan misi. Kinerja keuangan merupakan faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dilihat menggunakan analisis laporan keuangan atau analisis rasio (Rizky, 2013). Rasio merupakan suatu cara untuk membandingkan hubungan yang ada di laporan keuangan. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja, yaitu :

1. Profitabilitas

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

ROA adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dengan menggunakan aset sebagai aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar ROA, maka

semakin baik produktivitas aset untuk mendapatkan keuntungan (Sofyan, 20015: 305).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan (Sofyan, 20015: 305). ROE memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengatur modal secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan oleh pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. (Sawir, 2009: 20).

$$ROI = \text{Profit Margin} \times \text{Turnover of Operating Assets}$$

ROI adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROI, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Besarnya ROI dipengaruhi oleh tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasional dan profit margin, yaitu besarnya persentase keuntungan operasional dan jumlah penjualan bersih (Sofyan. 2015: 305).

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan per lembar saham untuk menghasilkan laba yang diperoleh investor atau pemegang saham. EPS dapat menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan apabila EPS yang dibagikan kepada investor tinggi, maka perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik kepada pemegang saham, sedangkan EPS yang dibagikan rendah, maka perusahaan tersebut gagal memberi manfaat yang diharapkan oleh pemegang saham (Sofyan, 2015: 305).

$$\text{Cash Flow Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak} + \text{Depresiasi}}{\text{Total Aktiva}}$$

Cash flow return on asset untuk mengukur kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasional.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Gross profit margin merupakan rasio untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok produksi (Sawir, 2009: 18). Semakin besar *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasional perusahaan bahwa harga pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin*, maka semakin buruk operasional perusahaan (Syamsuddin, 2009: 61).

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Net profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. *Net profit margin* menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar *net profit margin*, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi (Sofyan, 2015: 304).

2. Likuiditas

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila *current ratio* tinggi, maka aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar (Sofyan, 2015: 301) .

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar *quick ratio*, maka semakin baik (Sofyan, 2015: 302).

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Rasio yang digunakan untuk menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar.

3. Solvabilitas

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya hutang perusahaan dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau pemegang saham. Semakin kecil *debt to equity ratio*, maka semakin baik. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya (Sofyan, 2015: 303).

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini untuk mengukur antara total hutang dengan aktiva yang menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Aktiva harus

lebih besar supaya rasio lebih aman. Supaya ama, porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil (Sofyan. 2015: 304).

ROA sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Fathurrahman, 2015).

2.2.3 Good Corporate Governance

Pengertian *good corporate governance* menurut Bank Dunia yaitu suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Muh. Arief, 2009: 1). Pengertian *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur serta mengendalikan aktivitas perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Penerapan *good corporate governance* akan mendorong adanya cara kerja yang efektif, transparan, dan professional. Prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan diharapkan dapat menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya dengan berinvestasi (Muh. Arief, 2009: 2).

Good corporate governance merupakan proses dan aturan yang mengatur tentang hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi

untuk mencapai tujuan perusahaan. *Good corporate governance* sangat penting dalam mengatur hubungan dan mencegah adanya kesalahan dalam strategi perusahaan.

2.2.4 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Organization for Economics CO-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara, antara lain: Amerika Serikat, negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swiss, Swedia, Turki, Inggris), serta negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru), telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance* pada bulan April 1998. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut (Muh. Arief, 2009: 2-4) :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*).
Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* mampu melindungi hak-hak para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. Berikut yang mencakup hak dasar pemegang saham :
 - a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan
 - b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur

- d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)

Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Anggota dewan komisaris harus terbuka saat menemukan transaksi-transaksi yang mengalami konflik kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*)

Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* memberikan pengungkapan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mendorong kerja sama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, dan kesinambungan kerja.

4. Pemangku dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* memberi adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat saat adanya permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan. Pengungkapan ini mencakup informasi kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang

diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* memberi pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN yaitu :

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan (*disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta ataupun tidak, mengenai hal-hal yang berkenan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian (*independence*)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

6. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme adalah aturan atau tata cara kerja yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Bukhori dan Raharja (2010) mekanisme *corporate governance* merupakan mekanisme yang berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada di dalam suatu perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* adalah dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.2.6 Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dewan komisaris adalah salah satu fungsi kontrol yang ada di dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah bentuk efektif dari perusahaan. Dewan komisaris mewakili pihak internal perusahaan untuk melaksanakan pengawasan dan mengontrol perilaku manajemen (Bukhori dan Raharja, 2010).

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (Muh. Arief, 2009: 18).

Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan serta pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan (Bukhori dan Raharja, 2010). Dewan direksi dan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Peran direksi dan komisaris sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan

komitmen penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan (Muh. Arief, 2009: 9).

2.2.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah ukuran kepemilikan saham oleh institusi, institusi yang dimaksud adalah institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan besar terhadap investasi yang dilakukan perusahaan termasuk investasi saham (Etty, 2010). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Emilia, 2013). Kemampuan dari kepemilikan institusional adalah untuk mengendalikan pihak manajemen dengan memantau proses secara efektif. Penelitian Aditya dan Erwin (2015), pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain.

Umumnya kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan dapat mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004 dalam Emilia, 2013). Oleh beberapa peneliti, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Investasi pada saham perusahaan memperoleh penghasilan yang besar untuk memonitor tindakan manajemen (Emilia, 2013).

2.2.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan mengamati pengendalian internal. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut (Muh. Arief, 2009: 25) :

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Perkembangan praktik komite audit di Indonesia salah satunya perusahaan publik yang kehadirannya mendapat tanggapan yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), para investor, profesi penasihat hukum (advokat), profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen.

Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa (Muh. Arief, 2009: 33) :

1. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit.

3. Anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksud adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, maupun karyawan dari perusahaan tercatat tersebut. Sedangkan yang dimaksud pihak independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat tersebut maupun dengan komisaris direksi, serta pemegang saham utamanya, serta mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dengan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dewan direksi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap perusahaan. Fungsi dewan komisaris yaitu mengawasi kelengkapan informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Posisi dewan direksi sangat penting dalam mempengaruhi kepentingan *principal* suatu perusahaan. Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan dan nasihat bagi dewan direksi, serta banyaknya masukan dari pengawas untuk dewan komisaris terhadap dewan direksi dapat mendorong kinerja manajemen agar berdampak positif bagi

perusahaan (Dominikus dan Anis, 2014), sedangkan penelitian dari Arief dan Sri (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki pengaruh yang besar untuk mengelola sumber daya di perusahaan. Tugas dari dewan direksi untuk menentukan kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian Bukhori dan Raharja (2010) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili urusan perusahaan di luar maupun dalam perusahaan. Jika terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan di berbagai urusan perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian Kusdiyanto dan Dezy (2015) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut penelitian dari Amelia (2015) menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Emilia, 2013). Dalam teori keagenan kepemilikan institusional dijadikan cara untuk mengatasi masalah keagenan dengan kepentingan manajer dan pemegang saham. Penelitian Purweni dan Nik (2014)

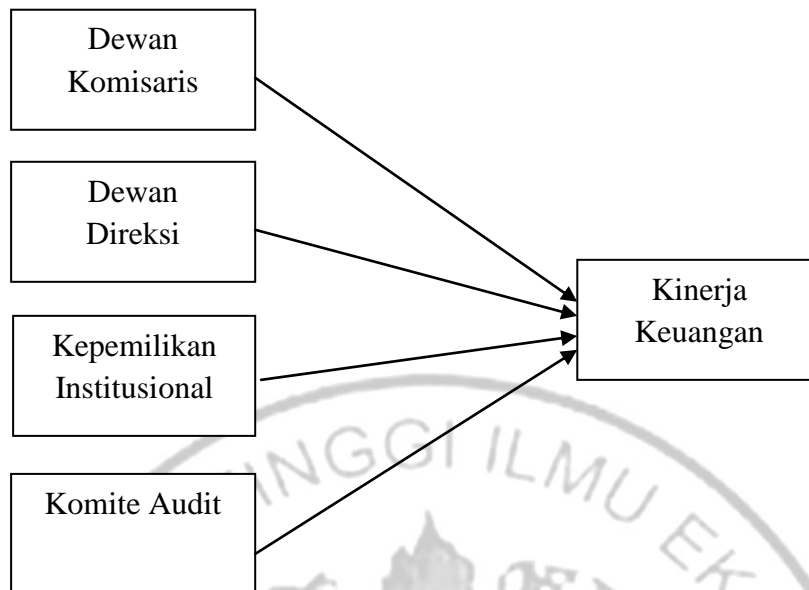
menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut penelitian Alyda dan Suhadak (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaporan kinerja keuangan. Menurut BAPEPAM dan Peraturan Bapepam-LK No. IX-15 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat. Maka, semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja akan semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya *moral hazard* dan menengahi masalah yang muncul sehingga *agent* dan *principal* memiliki keselarasan tujuan yang berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Dominikus dan Anis, 2014). Penelitian Wuryaningsih dan Ika (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut penelitian Rizky (2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa konstruksi.
- H₂ : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa konstruksi.
- H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa konstruksi.
- H₄ : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa konstruksi.